

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PBB-P2 DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Tarmizi¹, Lilis Maryasih², Teuku Maimun Azhari³

^{1,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

²Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala

¹tarmizi@unmuha.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of PBB-P2 acceptance and its contribution to Pidie District PAD for the 2014-2016 fiscal year. This research is a qualitative research, using secondary data sources in the form of Local Government Financial Reports (LKPD). Data analysis techniques were carried out descriptively, using financial ratio calculations to determine the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 revenues. The results showed that PBB-P2 receipts in the Pidie District Government were still not effective, because the achievement of an average target was 73.5% per year. Then in terms of its contribution to regional taxes and Pidie District PAD is still very lacking, with PBB-P2 contribution to regional taxes averaging 3.7% per year, and the contribution to PAD on average is 0.3% per year.

Keywords: PBB-P2, PAD, effectiveness, contributions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pidie tahun anggaran 2014-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pidie masih kurang efektif, karena pencapaian target rata-rata sebesar 73,5% pertahun. Kemudian ditinjau dari kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Pidie masih sangat kurang, dengan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 3,7% pertahun, dan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 0,3% pertahun.

Kata Kunci: PBB-P2, PAD, efektivitas, kontribusi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 28 Tahun 2009, sebagian kewenangan pemungutan PBB dialihkan kepada daerah, yang dikenal dengan sebutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengecualian sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikarenakan PBB pada ketiga sektor tersebut dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan



Pertambangan (PBB-P3). Oleh karena itu terdapat 2 (dua) jenis PBB berdasarkan kewenangan pemungutannya, yaitu PBB-P2 yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dan PBB-P3 yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD, dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 dan Kontribusi Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Pidie”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu dampak dari penerapan otonomi daerah adalah diberikannya hak-hak kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, salah satunya dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Darwin (2010:17), PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian tersebut sama persis dengan yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (37) UU No. 28 Tahun 2009. Sementara itu, Meliala dalam Agustina (2016) mendefinisikan PBB-P2 sebagai pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2009, pemerintah melakukan reformasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandai dengan pengesahan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan UU tersebut, dipertegas kembali jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemungutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemungutan Pemerintah Daerah Provinsi diantaranya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Rokok, dan lainnya. Sementara itu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diantaranya meliputi pajak hotel dan restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sekaran (2006:152). Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang dikemukakan oleh Sekaran (2006:152) dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2012:410), pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan melakukan perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pidie, yaitu:

1) Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan, oleh karena itu analisis efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat dirumuskan yaitu (Pekei, 2016:76):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target Penerimaan PBB - P2}} \times 100$$

Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif kinerja organisasi dalam merealisasikan PBB-P2, begitu juga sebaliknya. Pekei (2016:77) membagikan ukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam 5 (lima) kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Pekei (2016:77)

2) Pengukuran kontribusi

Pengukuran kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan PBB-P2 dalam upaya meningkatkan PAD. Pekei (2016:131) merumuskan perhitungan kontribusi penerimaan daerah, yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Semakin besar nilai rasio kontribusi mengindikasikan semakin besar kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, begitu juga sebaliknya. Damaiyanti dan Setiawan (2014) membagikan ukuran kontribusi PBB-P2 ke dalam 6 (enam) kriteria, yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 2 Kriteria Kontribusi Penerimaan PBB-P2

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Damaiyanti dan Setiawan (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pidie

Perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya. Perhitungan efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi yang telah dicapai dengan target yang dianggarkan, supaya dapat diketahui seberapa besar persentase pencapaian target yang telah dicapai. Sebagai ilustrasi perhitungan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pidie menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp987.943.501,- dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp588.921.845,- maka perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 di tahun 2014 yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 588.921.845}{\text{Rp } 987.943.501} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,596 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 59,6\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat diketahui efektivitas pemungutan PBB-P2 Kabupaten Pidie pada tahun 2014 sebesar 59,6%, yang mana berdasarkan kriteria efektivitasnya masih berada pada kriteria tidak efektif, karena rentang capaiannya masih di bawah 60%. Selanjutnya hasil-hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pidie pada tahun berikutnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Penerimaan PBB-P2			
	Target	Realisasi	%	Kriteria
2014	Rp 987.943.501	Rp 588.921.845	59,6%	Tidak Efektif
2015	Rp 987.943.501	Rp 544.117.928	55,1%	Tidak Efektif
2016	Rp 987.943.501	Rp 1.046.011.043	105,9%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp 987.943.501	Rp 726.350.272	73,5%	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pidie (2018)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pidie masih kurang efektif, dengan pencapaian targetnya hanya sebesar 73,5% pertahun. Pencapaian target tertinggi sebesar 105,9% yang didapatkan pada tahun 2016, sedangkan pencapaian terendahnya sebesar 55,1% yang didapatkan pada tahun 2015.

Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Pidie

Perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 bertujuan untuk mengukur kemampuan PBB-P2 dalam meningkatkan pajak daerah dan PAD. Perhitungan kontribusi PBB-P2 dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD, supaya dapat diketahui seberapa besar proporsi PBB-P2 dalam komponen pajak daerah dan PAD. Sebagai ilustrasi perhitungan, pada tahun 2014 realisasi PBB-P2 Kabupaten Pidie sebesar Rp588.921.845,- dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp 13.225.347.430,- maka perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah di tahun 2014 yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 588.921.845}{\text{Rp } 13.225.347.430} \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 0,045 \times 100$$

$$\text{Efektivitas} = 4,5\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat diketahui kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah Kabupaten Pidie pada tahun 2014 sebesar 4,5%, yang mana berdasarkan kriteria kontribusinya berada pada kriteria sangat kurang, karena rentang kontribusinya masih di bawah 10%. Selanjutnya hasil-hasil perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah Kabupaten Pidie pada tahun berikutnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Realisasi PBB-P2		Realisasi Pajak Daerah		Kontribusi	Kriteria
	Jumlah	+/-	Jumlah	+/-		
2014	Rp 588.921.845	0,0%	Rp 13.225.347.430	0,0%	4,5%	Sangat Kurang
2015	Rp 544.117.928	-7,6%	Rp 15.071.497.073	14,0%	3,6%	Sangat Kurang
2016	Rp 1.046.011.043	92,2%	Rp 35.966.538.764	138,6%	2,9%	Sangat Kurang
Rata-Rata	Rp 726.350.272		Rp 21.421.127.756		3,7%	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pidie (2018)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah Kabupaten Pidie masih sangat kurang, dengan persentasenya hanya sebesar 3,7% pertahun. Kontribusi paling tinggi hanya sebesar 4,5% yang terdapat pada tahun 2014, sedangkan kontribusi terendah sebesar 2,9% yang terdapat pada tahun 2016. Kemudian ditinjau dari kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Pidie, maka hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2014	Rp 588.921.845	Rp 166.598.720.923	0,4%	Sangat Kurang
2015	Rp 544.117.928	Rp 210.501.782.065	0,3%	Sangat Kurang
2016	Rp 1.046.011.043	Rp 249.489.453.846	0,4%	Sangat Kurang
Rata-Rata	Rp 726.350.272	Rp 208.863.318.945	0,3%	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pidie (2018)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Pidie masih sangat kurang, dengan persentasenya hanya sebesar 0,3% pertahun. Kontribusi paling tinggi hanya sebesar 0,4% yang terdapat pada tahun 2014 dan 2016, sedangkan kontribusi terendah sebesar 0,3% yang terdapat pada tahun 2015.

Pembahasan

Analisis dan Evaluasi Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pidie

Analisis dan evaluasi efektivitas PBB-P2 dimaksudkan untuk memberikan deskripsi/gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PBB-P2 sebagaimana yang telah ditargetkan. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui rata-rata efektivitas pemungutan PBB-P2 Kabupaten Pidie masih kurang efektif, dengan rentang capaiannya sebesar 73,5% pertahun.

Analisis dan Evaluasi Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Pidie

Analisis dan evaluasi kontribusi PBB-P2 dimaksudkan untuk memberikan gambaran/deskripsi mengenai peran PBB-P2 dalam meningkatkan penerimaan daerah, yang dilihat berdasarkan kontribusinya dalam komponen pajak daerah dan PAD. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Pidie masih sangat kurang, dengan kontribusinya

terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 3,7% pertahun, dan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 0,3% pertahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penerimaan PBB-P2 pada Pemerintah Kabupaten Pidie selama tahun anggaran 2014-2016 masih kurang efektif, karena pencapaian targetnya rata-rata sebesar 73,5% pertahun.
- 2) Ditinjau dari kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Pidie masih sangat kurang, dengan kontribusinya terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 3,7% pertahun, dan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 0,3% pertahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat disarankan beberapa saran diantaranya yaitu:

- 1) Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, seperti melakukan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dapat ditempuh melalui pemantapan kapasitas aparatur pemungut pajak, sosialisasi PBB-P2 kepada masyarakat, selalu melakukan pembaharuan (*update*) terhadap data wajib pajak dan objek pajak, dan lain sebagainya.
- 2) Pentingnya pemantapan kemampuan aparatur desa dalam hal PBB-P2 karena aparatur desa merupakan wakil pemerintah yang sangat dekat dan memahami kondisi wajib pajak dan objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. 2013. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-20.
- Adisasmita, R. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beni, P. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Damaiyanti, N.P.D., & Setiawan, I.P.E. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 97-105.
- Diana, A. & Setiawati, L. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis (Edisi 3)*. Yogyakarta: Andi.

- _____. 2014. *Perpajakan, Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Hendra, M. 2016. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2010-2014. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Nurmalasari, R. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*.
- Siahaan, M. 2013. *Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sibarani, P. 2012. *Penuntun Praktis dan Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademi*. Malang: Empatdua Media.
- TMBooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Ulum, I.M.D. 2012. *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, R., & Fadhlia, W. 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3, Hlm. 10-17.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T.S. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 81-89.
- Yani, A. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuraida, I. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah: Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.